

LAPORAN PENELITIAN

DILEMA RRI DAN TVRI SEBAGAI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
(KASUS LPP RRI SEMARANG DAN TVRI JAWA TENGAH)



Oleh

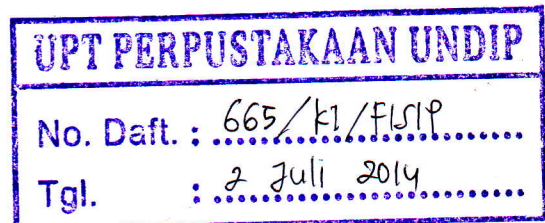
TURNOMO RAHARDJO

Dibiayai dari Sumber DanaDIPA FISIP Undip

Tahun Anggaran 2013

JURUSAN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO

2013




HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : Dilema RRI dan TVRI Sebagai Lembaga Penyiaran Publik
2. Kategori Tema : Integrasi nasional dan harmoni sosial
3. Bidang Ilmu : Ilmu Komunikasi

4. Ketua Peneliti
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : Dr. Turnomo Rahardjo
 - b. NIP/NIDN : 19601030 198703 1 001/0030106004
 - c. Jabatan Fungsional dan Golongan : Lektor/IIIc
 - d. Fakultas/Jurusan : ISIP/Ilmu Komunikasi
 - e. Alamat dan Nomor Telepon Kantor : Jl. Prof. Sudarto, SH Kampus Tembalang
: Semarang, (024) 7465408
 - f. Alamat dan Nomor Telepon Rumah : Jl. Ratu Ratih IV/33 Perumnas Tlogosari
: Semarang, (024) 6719466
5. Lokasi Penelitian : Semarang
6. Lama Penelitian : 6 (enam) bulan
7. Biaya yang Diperlukan : Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)
8. Sumber Dana : DIPA FISIP Undip Tahun Anggaran 2013

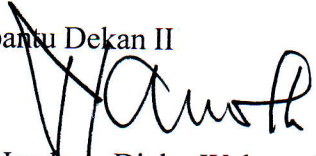
Peneliti



Dr. Turnomo Rahardjo ✓
NIP. 196010301987031001


Pejabat Pembuat Komitmen

Pembantu Dekan II



Drs. Handoyo Djoko Waluyo, M.Si ✓
NIP. 195801171987101001

Menyetujui



Dekan
Drs. Agus Hermani DS, MM
NIP. 195708071985771001

ABSTRAK

Pemberlakuan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah merubah sifat dan arah RRI dan TVRI. Sesuai dengan amanat UU Penyiaran tersebut, RRI dan TVRI ditetapkan sebagai lembaga penyiaran publik yang independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan kepada masyarakat. Sebagai lembaga penyiaran publik, RRI dan TVRI memiliki kewajiban untuk menyajikan isi siaran yang menekankan pada kebutuhan publik, lebih dari sekadar memenuhi keinginan publik. Tugas ini seharusnya mampu dilaksanakan oleh RRI dan TVRI, karena kedua lembaga penyiaran publik ini tidak dalam posisi “bersaing” dengan lembaga penyiaran swasta komersial.

Studi tentang Dilema RRI dan TVRI Sebagai Media Penyiaran Publik bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang persoalan-persoalan yang dihadapi RRI dan TVRI dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik, mengetahui perencanaan dan pengelolaan isi siaran yang sesuai dengan kepentingan publik, serta mengetahui penerimaan publik terhadap isi siaran RRI dan TVRI. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang “masa depan” RRI dan TVRI terkait dengan keberadaannya sebagai lembaga penyiaran publik di tengah-tengah hadirnya media penyiaran swasta komersial.

Secara konseptual, terdapat dua tipe utama media penyiaran, yaitu *public service model* dan *commercial model*. Karakteristik yang melekat pada lembaga penyiaran publik adalah cakupan geografis yang luas, menyajikan program siaran untuk semua kepentingan dan selera, memberi perhatian kepada identitas bangsa dan komunitas, dan menjaga jarak dengan berbagai kepentingan termasuk pemerintah, serta membuat program siaran yang bermutu lebih dari sekadar jumlah secara kuantitas. Isi siaran lembaga penyiaran publik diharapkan bisa menjadi pembanding, penyeimbang, bahkan *check-point* untuk akurasi informasi yang lebih tenang, teduh, dan tidak memihak.

Dalam tataran metodologis, penelitian ini menggunakan dua metoda, yaitu wawancara kualitatif dan survei. Wawancara kualitatif digunakan untuk mendapatkan data tentang persoalan-persoalan yang dihadapi oleh RRI dan TVRI dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik. Narasumber dari wawancara kualitatif ini adalah manajemen RRI Semarang dan TVRI Jawa Tengah, yaitu Kepala Stasiun dan Kepala Bidang Program Siaran). Metoda survei dipakai untuk memperoleh data tentang penerimaan publik terhadap isi siaran RRI (Semarang) dan TVRI (Jawa Tengah).

Penelitian ini menemukan bahwa dalam upaya menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyiaran publik, RRI dihadapkan pada persoalan-persoalan yang terkait dengan daya dukung SDM, finansial, dan teknologi. Kendala yang dihadapi kedua lembaga penyiaran publik tersebut akan memengaruhi kemampuan RRI dan TVRI untuk “bersaing” dengan lembaga-lembaga penyiaran swasta yang saat ini sudah mendominasi industri penyiaran di Indonesia. Studi ini juga menemukan bahwa penerimaan publik terhadap isi siaran yang disajikan RRI (Semarang) dan TVRI (Jawa Tengah) cenderung rendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun program siaran lembaga penyiaran publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan isi siaran lembaga penyiaran swasta, namun program siaran tersebut “tidak layak dengar” dan “tidak layak tonton”.

Secara akademis, implikasi dari penelitian ini adalah bahwa amanat UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yang menempatkan RRI dan TVRI sebagai lembaga penyiaran publik merupakan wujud dari *social responsibility* atau *public interest model* yang menegaskan bahwa hak untuk kebebasan publikasi perlu disertai dengan kewajiban kepada masyarakat yang lebih luas melampaui kepentingan diri sendiri. Isi siaran RRI dan TVRI secara normatif perlu dipahami sebagai upaya memberikan pencerahan kepada publik (*what the public need*) yang sudah barang tentu berbeda dengan program siaran lembaga penyiaran swasta yang mendefinisikan kepentingan publik sebagai apa yang diinginkan publik (*what the public want*).

Isi siaran RRI dan TVRI cenderung tidak layak “dengar dan tonton”. Dalam situasi seperti ini, perbaikan dan peningkatan kualitas isi siaran RRI dan TVRI mendesak untuk dilakukan, misalnya melalui pendidikan dan pelatihan agar RRI dan TVRI “diperhatikan” lagi oleh publik. Jika isi siaran yang disajikan RRI dan TVRI bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat, maka dukungan finansial dari mereka akan mengalir seperti yang terjadi di negara-negara lain. Publik akan secara sukarela memberikan dukungan finansial untuk menjamin eksistensi lembaga penyiaran publik mereka.

Kata kunci: lembaga penyiaran publik, *social responsibility* atau *public interest model*.